

INISIATIF MSP (*MALACCA STRAITS PATROLS*) DALAM MENANGANI ANCAMAN PEROMPAK DI SELAT MALAKA

Penulis: Julaene Foela Putri

Email : foelaputri@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Drs.M.Saeri,M.Hum

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-FISIP-Universitas Riau.
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

The Malacca Straits is defined as the world's most significant international maritime choke-points, and considered as straits used or international navigation, especially for international shipping who conduct oil transportation, threatened in Malacca Straits would be very detrimental to the global economy. Report issued by the International Maritime Bureau (IMB) related to piracy and armed robbery against ships obviously cause anxious by the international. The great cooperation among three three state (Indonesia, Malaysia, Singapore) become emergency to handle this problem. The focus of this research is the MSP (Malacca Straits Patrols) initiative who build by three states specifically to solve the piracy and armed robbery in Malacca Straits. The MSP Initiative structured by three elements patrols, there is MSSP (Malacca Sea Straits Patrols), EiS (Eyes in the Sky), and IEG (Intelligence Exchange Group). This research uses International Cooperation theory which has been revealed by K.J Holsti. This research is qualitative research which is used by library observation. The result of this research prove that full commitment between Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand in MSP Initiative very effective to reduce the frequencies of piracy and armed robbery until it reaches zero level on 2014. The MSP Initiative also open wide the cooperation among big countries such US, Japan, India to strengthening the patrols in Malacca Straits.

Keywords: *MSP Initiatives, Malacca Straits Patrols, Piracy, Armed Robbery.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan suatu studi yang mengangkat salah satu aspek kerjasama internasional dalam menangani salah satu rute maritim dan pesisir terpenting dan tersibuk global yaitu Selat Malaka. Penelitian ini menarik untuk diangkat karena upaya pengawasan maritim dan pesisir yang telah menjadi salah satu masalah keamanan yang paling diperhatikan sebagian besar negara di Asia Pasifik.

Penelitian ini terutama akan mengangkat inisiatif MSP (*Malacca Straits Patrols*) yang melibatkan empat negara pantai yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang baru bergabung di tahun 2008. Inisiatif pendekatan MSP baru diluncurkan pada bulan Juli tahun 2004 oleh Malaysia, Singapura, dan Indonesia untuk mendukung keamanan di selat Malaka

dalam melawan kegiatan terorisme dan pembajakan¹.

MSP ini terdiri atas tiga elemen yakni MSSP (*the Malacca Straits Sea Patrols*) dan EiS (*the Eyes in the Skies*), keduanya dipublikasikan sejak bulan September 2005, dan IEG (*Intelligence Exchange Group*) yang diluncurkan sejak tahun 2006². Sebagai komite koordinasi bersama yang terdiri dari perwakilan dari tiga negara untuk melakukan pertemuan rutin dua kali dalam setahun, dan dengan tiga kelompok kerja yang terfokus kepada tiga elemen tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja komite³.

Pembajakan maritim telah menjadi endemik ke daerah bagian Asia Tenggara sejak ratusan tahun yang lalu. Kegiatan ini diperkirakan muncul sejak tahun 1670 yakni ketika bangsa Belanda mencoba memonopoli rempah-rempah melalui Selat Malaka. Perdagangan yang dilakukan oleh Belanda dianggap telah menyimpang oleh penduduk lokal, sehingga menciptakan atau meningkatnya pembajakan di Asia Tenggara khususnya di perairan Selat Malaka. Pada abad ke-19, perompakan telah menjadi endemik di banyak dunia

Melayu, sebagian besar ini adalah penting karena dinamika politik, dengan peperangan antar suku dan membangun kekaisaran di nusantara. Perompakan adalah salah satu masalah yang tidak pernah habis selama periode kolonial⁴.

Sejak tahun 2000, Selat Malaka menjadi sorotan bagi dunia internasional terkait laporan-laporan yang menyatakan bahwa Selat Maritim sangat berbahaya bagi jalur perdagangan dikarenakan banyak kasus perompakan. Dilaporkan sebanyak 258 serangan bajak laut, termasuk lebih dari 200 pelaut di sandera, dan 8 tewas, sejak tahun 2002⁵.

Akan tetapi laporan tersebut tidak benar, banyak dari laporan tersebut terbukti palsu dan terkait kepada motif asuransi atau persaingan usaha. Data perompakan di Selat Malaka sebenarnya berdasarkan laporan Biro Maritim Internasional (IMB) yang menghasilkan laporan triwulan dan tahunan pembajakan serta perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal, hanya ada tiga yang berhasil, dan empat digagalkan pada tahun 2007. Hanya saja, satu diantara tiga yang sukses melakukan pembajakan, adalah bentuk pembajakan paling serius di Selat Malaka yang pernah terjadi sejak tahun yaitu penculikan.

Penculikan yang terjadi ditahun 2007 sebagaimana didokumentasikan oleh IMB dipimpin oleh sepuluh perompak bersenjata api, mereka melakukan pengrusakan terhadap semua

¹ *Malacca Strait Patrols*, diakses dari Website Resmi Oceans Beyond Piracy: (<http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/malacca-strait-patrols>), pada 25 Januari 2016.

² Sumit Ganguli, Andre Scobell, dkk, *Handbook of Asian Security Studies*, diakses dari: (https://books.google.co.id/books?id=kV-NAgAAQBAJ&pg=PA248&lpg=PA248&dq=how+Malacca+Strait+Sea+Patrols+works&source=bl&ots=k12nIVXsCE&sig=EYdf8j73FCRLbRU5sTGgpbC2Wk&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=how%20Malacca%20Strait%20Sea%20Patrols%20works&f=false), pada 25 Januari 2016, hal. 249.

³ Ian Storey, 2008, *Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress*, diakses dari: (nbr.org/.../asia.../AP6_E_Storey.pdf), pada 25 Januari 2016, hal. 116.

⁴ L. Wright, "Piracy in the Southeast Asian Archipelago", dalam buku, Peter Chalk, *Grey-Area Phenomena In Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking and political terrorism*.

⁵ *The Strait of Malacca, Pirates Haunt it, Sailors Fear it, Global Trade Depends on it*, diakses dari: (<http://ngm.nationalgeographic.com/2007/10/malacca-strait-pirates/pirates-text/3>) pada 02 Februari 2016

peralatan komunikasi, dan mencuri barang-barang pribadi awak, serta dokumen kapal. Para perompak tersebut kemudian menculik kepala kapal dan *chief engineer* yang mereka bawa kedarat dan sebagai sandera untuk meminta sejumlah uang tebusan. Tebusan yang diminta biasanya berkisar dari US\$100.000 – US\$200.000. Setelah uang tebusan berhasil dibayarkan, pada hari kesebelas tepatnya kedua tawanan dibebaskan⁶.

Tingkat pembajakan di Selat Malaka yang terus terjadi hingga tahun 2008 dikatakan masih dalam level terendah pembajakan maritim apabila dibandingkan dengan insiden pembajakan di kawasan laut lain terutama yang terjadi di Somalia⁷.

Akan tetapi sibuknya situasi pelayaran di Selat Malaka, dengan jumlah transit lalu lintas tercatat sebanyak 30.377 kapal per tahun, dan angka tersebut selalu meningkat secara bertahap sampai mencapai 77.000 gerakan kapan di tahun 2008⁸, diperkirakan sebanyak 117.000 di tahun 2010⁹. Menurut statistik tahun 2000, rata-rata harian kapal yang melewati

Selat Malaka dan Singapura adalah 399 kapal setiap 3,6 menit¹⁰. Menciptakan peluang tak berujung bagi bajak laut untuk menyerang.

Oleh sebab itu Indonesia bersama-sama dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand percaya bahwa tetap penting untuk memberi perhatian khusus terhadap keamanan di Selat Malaka terkait pembajakan ini, terutama karena letak strategis Selat Malaka yang menjadi selat penghubung tiga jalur lautan utama yakni Laut Cina Selatan di Utara, Samudera Hindia di Selatan, dan Samudera Pasifik di Timur, menjadikannya tidak hanya sebagai jalur pelayaran penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari Eropa dan Timur Tengah ke Asia Timur terutama kapal dagang, tetapi juga rute pelayaran sibuk untuk gerakan angkatan laut, dan kepentingan maritim lainnya¹¹.

Oleh sebab itu Selat Malaka tidak hanya merupakan kepentingan strategis bagi littoral states tetapi juga untuk masyarakat internasional dengan lebih dari 50.000 kapal yang membawa seperempat dari seluruh perdagangan dunia melewati selat tersebut sepanjang tahun¹². Maka inisiatif kerjasama antar empat negara pantai yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand seperti MSP akan memainkan peran paling efektif dalam mencegah pembajakan dan serangan laut lainnya. Dalam MSP

⁶ Catherine Zara Raymond, *Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait*, diakses dari: (<https://www.usnwc.edu/getattachment/7835607e-388c-4e70-baf1-b00e9fb443f1/Piracy-and-Armed-Robbery-in-the-Malacca-Strait-A-.aspx>), pada 01 Februari 2016

⁷ *Ships Warned of Theft in Malacca, Singapore Straits*, diakses dari: (217.26.101.136/mfa/nieuws/pietsinke/2015/2015_0311.pdf), pada 25 Januari 2016.

⁸ Mohd Hazmi Bin Mohd Rusli, *Navigational Hazards in International Maritime Chokepoints: A Study of the Straits of Malacca and Singapore*, diakses dari: (www.uq.edu.au/~mohdmohdrusli7-2.pdf), pada 25 Januari 2016

⁹ *The Issue of Piracy*, diakses dari: (<https://sites.google.com/a/uconn.edu/strait-of-malacca/issue-of-piracy>), pada 25 Januari 2016.

¹⁰ *Case Concerning Sovereignty Over Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge*, dari: (<http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14133.pdf>), pada 25 Januari 2016

¹¹ Catherine Zara Raymond, *op.cit*

¹² *Nilai Penting Selat Malaka*, diakses dari Website Resmi Kemlu: (<http://www.kemlu.go.id/layouts/mpbile/PortaldetailNewsLike.aspx?I=id&ItemId=aa2d0627-c3b7-47a4-b389-da5bca18dd54>) pada 20 Januari 2016

diatur koordinasi patroli bagi negara-negara pantai sambil tetap mempertahankan komunikasi dan pertukaran informasi.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana efektivitas inisiatif MSP (*Malacca Straits Patrols*) dalam menangani ancaman perompak di Selat Malaka sejak tahun 2004 - 2014?

KERANGKA TEORITIS

1. Tingkat Analisa

Dalam menganalisis masalah yang dikemukakan, peneliti menggunakan tingkat analisis Negara Bangsa (*Nation State*). Asumsi dari tingkat analisis negara bangsa menurut Patrick Morgan ialah negara bangsa merupakan faktor penentu dalam hubungan internasional, dan setiap pembuat keputusan dimanapun berada pada dasarnya berlaku sama apabila menghadapi situasi yang sama¹³. Kajian mengenai kerjasama internasional yang tergabung dalam *the Coral Triangle Initiative* oleh sebab itu termasuk dalam tingkat analisis negara bangsa.

2. Perspektif Neo Liberalis

Pembahasan penelitian ini menggunakan perspektif neo-liberalis, asumsi dari pemikiran Neo-Liberalis berakar pada tradisi pemikiran Liberalis, yang berkeyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, karena sifat ini akan lebih memajukan masyarakat dunia. Sifat ini pula didukung dengan pengembangan akal pikiran, serta kepekaan sosial, yang dipergunakan secara maksimal, akan membentuk kerjasama yang dapat memperbaharui

aspek-aspek kehidupannya (modernisasi), dan menimbulkan pola kerjasama dalam lingkup internasional yang bisa mewujudkan kemajuan perdamaian bersama. Neoliberalisme khususnya mengacu kepada perkembangan filosofi, ekonomi, dan politik akhir abad kedupuluhan, yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Liberalisme Klasik.

3. Teori Kerjasama Internasional

Teori kerjasama internasional terbentuk atas dasar pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara yang terkait kepada kepentingan nasional (*national interest*) negara. Teori ini dilatarbelakangi oleh konsep kesadaran bahwa semua negara didunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Pada kenyataannya diperlukan kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Hubungan kerjasama antar negara juga realitanya mampu menawarkan pencapaian kesejahteraan bersama dengan lebih cepat. Sebagaimana diuraikan oleh K.J Holsti, bahwa proses kerjasama atau kolaborasi dapat terbentuk melalui perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara¹⁴, seperti halnya masalah kelautan dikawasan Selat Malaka ini yang dibentuk karena kesamaan latar belakang maritim dan keinginan untuk bersama-sama menghadapi masalah isu terorisme dan pembajakan maritime di wilayah tersebut.

a. Kerjasama internasional merupakan gabungan atau saling bertemunya dua atau lebih pandangan,

¹³Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1994, LP3S, Jakarta, hal. 41

¹⁴ K.J Golsti. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal 652-653

kepentingan, nilai dan tujuan yang kemudian dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dapat dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

- b. Kerjasama internasional merupakan hasil dari pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negaranya demi mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Kerjasama internasional merupakan persetujuan antara dua Negara atau lebih dalam rangka menghadapi masalah-masalah tertentu, dengan memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Kerjasama internasional merupakan aturan resmi atau tidak resmi mengenai kesepakatan transaksi yang akan dilakukan dimasa depan.
- e. Kerjasama internasional merupakan pemenuhan persetujuan antar dua Negara atau lebih.

Kawasan perairan perbatasan seperti Selat Malaka merupakan kawasan strategis yang dalam menjaganya perlu pengelolaan secara khusus. Pengelolaan dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan, peningkatan kesejahteraan, maupun kelestarian lingkungan. Pada penelitian ini ancaman perompakan bersenjata merupakan isu terorisme yang tentunya akan mengancam apabila tidak ditangani bersama-sama. Penting untuk memanfaatkan kerjasama level regional dan ekstra regional dalam merespon ancaman-ancaman ini untuk memperkecil kemungkinan perkembangan ancaman perompakan Selat Malaka di Masa Depan.

Sebagaimana teori kerjasama KJ Holsti, dalam prakteknya, kerjasama

MSP ini terbentuk antar regional yakni antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia di tahun 2004, serta bergabungnya Thailand di tahun 2008 karena kesamaan kepentingan dan pandangan bahwa ancaman yang terjadi di Selat Malaka merupakan isu keamanan bersama. Penanganan ancaman akan menjadi tidak realistis apabila patrol hanya dilakukan secara sepihak atau dilakukan oleh Negara-negara lain yang tidak memiliki hak di kawasan Selat Malaka. Oleh sebab itu bekerjasama dengan para pemain regional akan mampu membantu melakukan lebih banyak upaya dalam mewujudkan Selat Malaka yang aman bagi situasi pelayaran dan perdagangan.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis eksplanasi, yaitu jenis penelitian yang menganalisa suatu fenomena berdasarkan data-data yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan internet sebagai sarana dalam proses pengumpulan data yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menerapkan batasan-batasan pada penelitian agar fokus dalam melakukan penelitian terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Pertama, penelitian ini difokuskan pada status, peranan, dan bentuk-bentuk strategi yang dilakukan dalam kerangka MSP

(the Malacca Straits Patrols) menghadapi ancaman perompakan di Selat Malaka.

INISIATIF MSP

Kerjasama Empat Negara (Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand)

Mandat didalam Pasal 43 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara-negara pantai yang memiliki kedaulatan dan hak berdaulat memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan perairan, Terkait kepada pengawasan Selat Malaka maka negara pemakai dan berbatasan dengan selat ini dibebani tugas agar mampu bekerjasama untuk: a) pengadaan dan pemeliharaan Selat, termasuk didalamnya adalah sarana bantu navigasi, keselamatan yang diperlukan, dan pengembangan sarana bantu pelayaran internasional; dan b) pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Pada mandat ini pula disebutkan bahwa kerjasama tidak harus hanya pada negara-negara pantai yang berdaulat atas perairan, tetapi juga *stakeholder* lain seperti negara maupun perusahaan pengguna perairan lainnya.

Persoalan terkait pengelolaan bersama atas satu perairan sebenarnya menyangkut kepada tiga isu utama yaitu: a) keselamatan navigasi; b) perlindungan lingkungan; dan c) keamanan. Masalah perompakan kemudian masuk kedalam persoalan keamanan (*security*) meskipun didalam Pasal 43 UNCLOS 1982 kerjasama masalah keamanan tidak tercantumkan, namun laporan mengenai maraknya aksi kejahatan di Selat Malaka, menyebabkan tiga negara sepakat untuk membawa masalah keamanan kelautan khususnya masalah perompak dalam fokus perhatian pengelolaan Selat Malaka.

Selain itu pula konsepsi pengamanan laut merupakan bagian dari suatu pemahaman mengenai konsep keamanan nasional yang pada intinya adalah menjadi titik ukur kapabilitas negara melindungi *core values* (nilai-nilai inti negara) yang elemennya mencakup semua *resources* yang ada¹⁵.

Kerjasama antara negara pantai Selat Malaka yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia sudah ada sejak tahun 1971 melalui pengeluaran pernyataan bersama terkait keselamatan pelayaran dan persoalan internasionalisasi yang dispesifikasikan. Akan tetapi baru pada bulan Juli 2004 kerjasama trilateral MALSINDO (Malaysia, Singapura, Indonesia) secara signifikan mengatasi bajak laut di perairan Selat Malaka pertama kali diperkenalkan hingga selanjutnya, MSP (*Malacca Strait Patrol*) diluncurkan sebagai revisi perjanjian MALSINDO. MSP mengatur lebih spesifik tentang tugas negara-negara pantai untuk melakukan patroli terkoordinasi sambil tetap mempertahankan komunikasi dan pertukaran informasi. Inisiatif MSP ini diharapkan mampu memudahkan aksi konkrit untuk menjaga keamanan Selat Malaka, dengan kunci keberhasilan terletak pada patroli angkatan laut masing-masing negara.

MSP diluncurkan oleh Singapura, Malaysia, dan Indonesia tepat pada bulan September 2007 sebagai sebuah pendekatan baru untuk mendukung keamanan di Selat Malaka dan merespon kekhawatiran dunia internasional terhadap jalur perdagangan pelayaran di Selat Malaka.

¹⁵ Rizal Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy*, diakses dari: (http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134514540_sample_534795.pdf), pada 04 April 2016

Secara teknis dalam pengaturan MSP ketiga negara sepakat untuk membentuk sistem pengamanan yang lebih terpadu melalui pembentukan komite pengamanan bersama tentang Selat Malaka. Komite bersama ini menjadi payung bagi seluruh kerjasama pengamanan yang telah ada. Terdapat tiga macam kerjasama pengamanan yang dilaksanakan yang merupakan elemen dari MSP yaitu *Malacca Straits Sea Patrols (MSSP)*, *Eyes in the Sky (EiS)*, *Intelligence Exchange Group (IEG)*¹⁶.

Malacca Straits Sea Patrols (MSSP). Untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka dan Singapura serta untuk meningkatkan pengaturan bilateral yang ada, Indonesia, Malaysia, Singapura meluncurkan kerjasama trilateral MSSP pada bulan Juli 2004. Di bawah perjanjian ini, negara-negara yang berpartisipasi tersebut melakukan patroli terkoordinasi sementara memfasilitasi pembagian informasi antar kapal dan MAA (*Monitoring and Action Agency*). MSSP dilaksanakan oleh *Fleet Operation Centre Commander (FOCC)*

Eyes in the Sky (EiS). Untuk memperkuat upaya patroli di laut dilakukan pengawasan melalui udara yaitu *Eyes in the Sky (EiS)*. Inisiatif EiS pertama kali diusulkan oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia selama berlangsungnya *Sharing-La Dialogue* pada bulan Juni 2005 di Singapura. Inisiatif EiS kemudian resmi diluncurkan pada bulan September 2005¹⁷. EiS

dibentuk sebagai komponen untuk mendukung inisiatif MSSP dalam meningkatkan keamanan jalur strategis untuk perdagangan internasional yaitu Selat Malaka, dengan menawarkan gabungan kekuatan serta koordinasi melalui patroli udara di atas Selat Malaka menggunakan pesawat patroli maritim Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Terbentuknya EiS kemudian menuntut tiga negara lebih sarat akan domain maritim mereka di Selat Malaka dan segera menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam hal pesawat patroli maritim dan CMPT (*Combined Maritime Patrol Team*). CMPT dibentuk untuk membangun gambaran permukaan komprehensif atas daerah yang ditunjuk oleh penyiaran kontak yang ditangkap mencurigakan pada frekuensi radio yang ditunjuk untuk MAA¹⁸. EiS memiliki kelebihan dibandingkan MSSP terkait masalah pelanggaran kedaulatan nasional, pada EiS pesawat patroli maritim diizinkan *overflight* diluar wilayah perairan masing-masing negara. Pelaksanaan patroli ini sementara itu dilaksanakan oleh *RMAF Air Operation Commander*, yakni organisasi satuan tugas maritim yang diletakkan di bawah tanggung jawab FOC untuk unsur udara, dengan daerah cakupan operasi untuk proyek ini adalah wilayah udara nasional dan internasional di atas Selat Malaka dan Selat Singapura. Pusat operasi EiS adalah *Defence Operation Room (DOR)* yang berpusat di Markas Angkatan Tentara Malaysia, DOR bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan dan koordinasi tingkat strategik dengan angkatan bersenjata TNI. DOR banyak memainkan peran dalam operasi EiS mulai dari

¹⁶ *Factsheet: Milestones of Malacca Straits Patrol*, diakses dari:

(http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html#.VwqCvnqw_IW), pada 01 April 2016

¹⁷ *Launch of Eyes in the Sky (EiS) Initiative*, diakses dari:

(http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_roo

[m/official_releases/nr/2005/sep/13sep05_nr.html#.VxOODXqw_IU](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/sep/13sep05_nr.html#.VxOODXqw_IU)), pada 02 April 2016

¹⁸ *Ibid.*,

perencanaan, koordinasi, hingga menugaskan pesawat untuk memantau maritim udara. Sementara tugas pemantauan maritim udara harian dilaksanakan oleh POTU (Pusat Operasi Tentara Udara) namun POTU tidak terlibat langsung dalam satuan tugas operasi dan memantau secara keseluruhan¹⁹. Patroli EiS dilakukan dengan menggunakan pesawat udara dari salah satu negara peserta secara bergantian dan didalam pesawat terbang tersebut terdapat awak pesawat sebagai *Liason Officer* (LO) dari negara lain yang disebut CMPT (*Combine Maritime Patrol Team*) selama minimum dua kali patroli dalam seminggu. Patroli ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan patroli laut. EiS dibentuk untuk lebih meningkatkan keselamatan Selat Malaka, tiga negara pesisir Selat Malaka, Malaysia, Indonesia, dan Singapura membuka kerjasama *Eye in the Sky* (EiS). EiS dicapai di Kuala Lumpur, menyusu pertemuan tiga menteri luar negeri di Batam. Thailand belakangan meminta untuk dapat berpartisipasi. EiS adalah kerjasama pemantauan udara maritim untuk meningkatkan keselamatan, menumpas perompak dan kejahatan di Selat Malaka. EiS dilaksanakan mulai 13 September 2005 dengan tujuan mengamankan selat secara lebih terpadu dan terkoordinatif tidak saja di laut tetapi juga di udara. Operasi ini dilancarkan dalam waktu tujuh hari dalam sepekan, dengan masing-masing negara mengirimkan 7 kapal perang dan 2 pesawat pengintai untuk mengamankan selat sepanjang 500 mil tersebut. Namun mengingat AL Malaysia dan AL

Singapura tidak memiliki pesawatintai patroli, maka pelaksanaan pengamanan udara dilakukan melalui kerjasama TNI AU dengan tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) dan TNI AU dengan Royal Air Force (RAF) Singapura.

Mekanismenya pesawat pengintai melaporkan kejadian ke markas operasi TNI AU di Jakarta, yang kemudian pasukan khusus Indonesia dikirim guna mempersempit ruang gerak perompak untuk bersembunyi atau melarikan diri²⁰. Pada perkembangannya, patroli terus memperluas wilayah pengawasan, dan berhasil menghilangkan tumpang tindih daerah operasi. EiS merupakan kerjasama paling kongkrit dan bersejarah karena untuk pertama kalinya tiga negara terlibat secara serius menangani masalah keselamatan maritim di Selat Malaka. Karena selama ini upaya pengamanan lebih banyak dilakukan secara sepihak, EiS menunjukkan bahwa negara-negara pesisir Selat malaka serius bertanggung jawab melindungi Selat tersebut. Selain patroli rutin yang terkoordinasi, pertemuan rutin juga dilakukan demi mempercepat proses penanganan masalah keamanan Selat Malaka secara tuntas, tidak hanya terkait masalah perompakan, tetapi juga masalah pemeliharaan sumber daya lautan Selat Malaka.

Intelligence Exchange Group (IEG) dibentuk untuk mendukung patroli laut dan udara yang mengarah kepada pengembangan platform berbagi informasi yang disebut dengan istilah MSP-IS (*Malacca Strait Patrols Information System*). IEG dibentuk dibawah Dewan Kordinasi Bersama

¹⁹Diakses dari:
http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_3911_12_H/files/res/downloads/download_0075.pdf
pada 14 Maret 2016

²⁰ Walter S jones, *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi - Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*, 1993, Gramedia: jakarta, hal. 199

(JCC/ *Joint Coordinating Council*) pada tahun 2006. JCC dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan patroli maritim dan udara dari empat negara anggota (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand). IEG terdiri dari badan-badan intelijen dari negara-negara peserta dan bertugas untuk memberikan dukungan analisis bagi keperluan misi MSSP maupun EiS. IEG mengarah kepada pengembangan kerangka pembagian informasi yang disebut *Malacca Straits Patrol Information System* (MSP-IS)²¹. Inisiatif IEG memanfaatkan penggunaan internet MSP-IS yang disempurnakan bersama dengan kesadaran situasional dan fasilitas kerjasama dalam hal respon kolektif. MSP-IS dikembangkan oleh Badan Sains dan Teknologi Pertahanan (*Defence Science & Technology Agency/ DSTA*) dengan dua komponen utama yaitu: 1) secara terus menerus memperbarui informasi atabase tentang kapal, dan 2) program untuk menganalisis pola lalu lintas maritim²². Media internet dipilih untuk menjamin aksesibilitas dan kemudahan penggunaan untuk pengguna yang berwenang yaitu *user-friendliness*, properti penting dalam sistem komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Case Concerning Sovereign Over Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh,

²¹ Joseph Liow, Michael Leifer, 2014, *Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia*, Routledge, hal. 243

²² *Technology to Boost Maritime Security*, diakses dari: (http://www.strengthenns.sg/imindef/resource/library/cyberpioneer/topics/articles/news/2008/March/28mar08_news.print.noimg.html), pada 04 April 2016.

Midle Rocks and South Ledge, dari: (<http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14133.pdf>), pada 25 Januari 2016

Diakses dari:

<http://docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?OpenAgent&DS=A/62/518&Lang=E&Type=DOC>, pada 20 Maret 2016

Diakses dari:

([https://www.mmea.gov.my/artikel/Siaran Media/2015/SIARAN%20MEDIA-%20Kes%20Rompakan%20MIT%20Orkim%20Harmony%20-%2022%20Jun%202015.pdf](https://www.mmea.gov.my/artikel/Siaran%20Media/2015/SIARAN%20MEDIA-%20Kes%20Rompakan%20MIT%20Orkim%20Harmony%20-%2022%20Jun%202015.pdf)), pada 20 Maret 2016

Diakses dari:

(http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_3911_12_H/files/res/downloads/download_0075.pdf), pada 14 Maret 2016

Factsheet: Milestones of Malacca Straits Patrol, diakses dari:

([http://www.mindef.gov.sg/imindef/press room/official releases/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html#.VwqCvnqwIW](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press%20room/official%20releases/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.html#.VwqCvnqwIW)), pada 01 April 2016

Ganguli, Sumit, Andre Scobell, dkk.

Handbook of Asian Security Studies, diakses dari:

(https://books.google.co.id/books?id=kV-NAgAAQBAJ&pg=PA248&lp_g=PA248&dq=how+Malacca+Strait+Sea+Patrols+works&source=bl&ots=k12nIVXsCE&sig=EYdf8j73FCRLbRU5sTGgpbC2Wk&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=how%20Malacca%20Strait%20Sea%20Patrols%20works&f=false), pada 25 Januari 2016.

Graham, Euan. *Expanding Maritime Patrols in Southeast Asia*,

- diakses dari:
(<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/04/CO15082.pdf>), pada 09 Maret 2016.
- Hazmi, Mohd Bin Mohd Rusli. *Navigational Hazards in International Maritime Chokepoints: A Study of the Straits of Malacca and Singapore*, diakses dari: (www.uq.edu.au/~mohdmohdrusli7-2.pdf). Pada 25 Januari 2016.
- Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca*, diakses dari: (<http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1213-threatconvergence-malaccastraits-08e.pdf>), pada 24 Maret 2016.
- Lanteigne, Mark *China's Emerging Arctic Strategies: Economics and Institutions*, diakses dari: (ams.hi.is/~2014/11/ChinasEmergingArcticStrategiesPDF_FIX2.pdf), pada 20 Oktober 2015.
- Malay Archipelago*, diakses dari: (<http://www.maritimeheritage.org/ports/malaccaStrait.html>), pada 09 Maret 2016
- Paleri, Prabhakaran. *Coast Guards of the World and Emerging Maritime Threats*, diakses dari: (https://www.sof.or.jp/en/report/pdf/200903_ISSN1880-0017.pdf). Pada 25 Januari 2016
- Raymond, Catherine Zara. *Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait*, diakses dari: (<https://www.usnwc.edu/getattachment/7835607e-388c-4e70-baf1-b00e9fb443f1/Piracy-and-Armed-Robbery-in-the-Malacca-Strait--A-.aspx>), pada 01 Februari 2016
- Ships Warned of Theft in Malacca, Singapore Straits*, diakses dari: (217.26.101.136/mfa/nieuws/pietsinke/2015/2015_0311.pdf), pada 25 Januari 2016.
- Singapore Coastline Length* diakses dari: (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html>) pada 09 Maret 2016
- Storey, Ian. 2008. *Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress*, diakses dari: (nbr.org/~asia/AP6_Story.pdf), pada 25 Januari 2016.
- Sukma, Rizal. *Islam in Indonesian Foreign Policy*, diakses dari: (http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134514540_sample_534795.pdf), pada 04 April 2016
- Technology to Boost Maritime Security*, diakses dari: (http://www.strengthenns.sg/im indef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2008/March/28mar08_news.print.noimg.html), pada 04 April 2016.
- Terjemahan UNCLOS 1982*, diakses dari: (hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc), pada 09 Maret 2016
- Yasin, Mat taib bin dan Azahar Hakim Herriman. *Force Structure Planning for the Malaysian Maritime Enforcement Agency*, diakses dari: (<http://www.searesources.biz/Force%20Structure%20Calculations.pdf>), pada 01 Februari 2016

Website:

- Bandoro, Bandarto. *Keamanan Maritim di Selat Malaka*, diakses dari: <http://www.dmc.dephan.go.id/html/artikel/2006/mei/230506selatmalaka.htm>, pada 03 Maret 2016
- Launch of Eyes in the Sky (EiS) Initiative*, diakses dari: (http://www.mindef.gov.sg/imi/ndef/press_room/official_releases/nr/2005/sep/13sep05_nr.htm#.#.VxOODXqw IU), pada 02 April 2016.
- Michael G. King Jr, 2010, *Modern Piracy and Regional Security Cooperation in the Maritime Domain: the Middle East and Southeast Asia*, diakses dari: (<https://www.hsdl.org/?view&id=23005>), 02 April 2016.
- Nilai Penting Selat Malaka*, diakses dari Website Resmi Kemlu: (<http://www.kemlu.go.id/layouts/mpbile/PortalDetailNewsLike.aspx?I=id&ItemId=aa2d0627-c3b7-47a4-b389-da5bca18dd54>) pada 20 Januari 2016
- The Issue of Piracy*, diakses dari: (<https://sites.google.com/a/uconn.edu/strait-of-malacca/issue-of-piracy>), pada 25 Januari 2016.
- Buku:**
- Anatona, *Perbudakan dan Perdagangan Budak di Kawasan Selat Malaka, 1786 - 1880-an*, UGM: Yogyakarta.
- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim: Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Mata Air Inspirasi
- Amal, M. Adnan. 2010. *Portugis & Spanyol di Maluku*, Komunitas Bambu: Jakarta
- Buys, M. 1886. *Twee Jaren op Sumatera's Westkust*, Amsterdam: A. Akkeringa
- Cleary, Mark dan Kim Chuan Goh. 2000. *Environment and Development in the Straits of Malaza*. Routledge
- Dam, Syamsumar. 2010. *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Eschels, Adolf dan Kroon. 1783. *Beschrijving van het Eiland Sumatera*. Haarlem: C.H Bohn en Zoon
- Gerke, Solvay. 2009. *Perkembangan Selat Malaka*, CenPRIS: USM
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Erlangga: Jakarta
- Jeffry, Rawis. 2004. *Menjahit Laut yang Robek*, Penerbit Yayasan Malesung: Jakarta
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi - Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*. Gramedia: Jakarta
- Kielstra, E.B. 1888. *Een Bijdrage tot E.B Kielstra;s opstellen over Sumatera's Westkust*. BKI
- Kroeskamp, Hendrik. 1931. *De Westkust en Minangkabau*. Utrecht: Fa. Schtanus & Jens
- Rukman, 2009, *Peningkatan Pengamanan Daerah Perbatasan Laut Selat Malaka*, Tesis UGM: Yogyakarta.
- Singh, Daljit. 2009. *Southeast Asian Affairs 2009*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Liow, Joseph dan Michael Leifer. 2014. *Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia*, Routledge

- Mas' oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S: Jakarta
- Meilink - Roelofsz. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Martinus Nijhoff; Den Haag
- Nuswantoro, Edhi. 2008. *Strategi Penanganan Perompakan di Selat Malaka dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara di Laut*. Thesis Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Schierke, B. 1955, *The Batak: Peoples of the Island of Sumatera*. Thames and Hudson, Ltd, London
- Setyaka, Virtous. 2006. *Perbedaan Sikap Negara-Negara Pantai Pemilik Selat Malaka (Indonesia, Malaysia, Singapura) terhadap Kehadiran Militer Amerika Serikat dalam Pengamanan Selat Malaka*, Tesis UGM: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Warren, James Francis. 2002. *Lanun and Balangingi; Globalization Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity*, Singapore: University Press
- Wijaya, Hamsuk S. 2000. *Kedudukan Status Selat Malaka dan Pengaruhnya terhadap ASEAN*. Lemhannas: Jakarta